SULTAN BAYANGAN DAN DUALISME KEKUASAAN DALAM KESULTANAN JAMBI PADA MASA SULTAN THAHA SAIFUDDIN

Angelina Clara Cinta Gracia Sagala[1], Nurul Amira[2], Siska[3], Novia Alfirani[4], M. Maulana Yusuf[5], Fatonah[6], Nirwan Il Yasin[7],
angelinaclaracinta@gmail.com[1], nurul4miraa@gmail.com[2], siska497031@gmail.com[3], noviaalfirani@gmail.com[4], maulanayusuf6282@gmail.com[5], fatonah.nurdin@unja.ac.id[6], nirwan87@unja.ac.id[7]
Universitas Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas munculnya Sultan Bayangan dan dualisme kekuasaan dalam Kesultanan Jambi pada masa Sultan Thaha Saifuddin. Tujuan penelitian ini berfokus membahas pada munculnya kedudukan Sultan Bayangan setelah Belanda menguasai Keraton Jambi pada tahun 1858 serta pengaruhnya terhadap struktur kekuasaan Kesultanan Jambi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian berupa buku sejarah, artikel jurnal, dan sumber digital yang membahas Kesultanan Jambi, Sultan Thaha Saifuddin, serta hubungan politik Jambi dengan pemerintah kolonial Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Sultan Thaha Saifuddin meninggalkan Keraton Jambi dan berpindah ke wilayah pedalaman, Belanda mengangkat Panembahan Prabu sebagai Sultan Ahmad Nazaruddin pada 2 November 1858. Pengangkatan tersebut menghasilkan dua bentuk legitimasi kekuasaan. Sultan Ahmad Nazaruddin memperoleh pengakuan formal dari pemerintah Belanda, sedangkan Sultan Thaha Saifuddin tetap memperoleh dukungan dan pengakuan dari sebagian masyarakat Jambi. Kondisi tersebut kemudian membentuk dualisme kekuasaan dalam Kesultanan Jambi. Dengan demikian, istilah Sultan Bayangan tidak hanya menunjukkan sultan yang berada dalam pengaruh Belanda, tetapi juga menggambarkan adanya perbedaan antara kekuasaan formal yang didukung kolonial dan legitimasi politik Sultan Thaha di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Sultan Bayangan, Sultan Thaha Saifuddin, Kesultanan Jambi, Dualisme Kekuasaan, Kolonialisme.

ABSTRACT

The appointment of Sultan Ahmad Nazaruddin by the Dutch colonial government in 1858 created a political situation in which two claims to authority emerged in the Jambi Sultanate. Sultan Thaha Saifuddin, who had moved to the interior of Jambi after the Dutch occupation of the royal palace, continued to be regarded by many Jambi people as the legitimate sultan. At the same time, Sultan Ahmad Nazaruddin was appointed by the Dutch and formally placed in the position of Sultan of Jambi. This study aims to examine the emergence of the "Shadow Sultan" position and the dualism of power in the Jambi Sultanate during the reign of Sultan Thaha Saifuddin. The study uses a historical method consisting of source collection, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used include historical books, journal articles, and digitized government publications concerning the history of Jambi and Dutch colonial expansion. The results show that the dualism of power emerged from the Dutch intervention in the Jambi succession and the appointment of Ahmad Nazaruddin after the occupation of the Jambi palace in 1858. Although Ahmad Nazaruddin held formal recognition from the Dutch colonial government, Sultan Thaha retained political influence among sections of the population and continued to exercise authority in the interior. Thus, the term "Shadow Sultan" reflects the difference between formal colonial recognition and the continuing legitimacy of Sultan Thaha among Jambi society.

***Keywords**: Sultan Bayangan, Sultan Thaha, Kesultanan Jambi, Dualisme Kekuasaan, Belanda.*

PENDAHULUAN

Kesultanan Jambi merupakan salah satu kekuasaan lokal di Sumatra yang mengalami

perubahan besar ketika pengaruh kolonial Belanda semakin kuat pada abad ke-19 (Locher-Scholten, 2004) . Hubungan antara Kesultanan Jambi dan Belanda tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga berkembang menjadi persoalan politik dan kedaulatan. Perjanjian-perjanjian yang dibuat pada masa sebelumnya secara bertahap memberikan ruang bagi Belanda untuk mencampuri urusan pemerintahan Jambi (Locher-Scholten, 2004) . Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang meningkatnya ketegangan antara Kesultanan Jambi dan pemerintah kolonial pada masa Sultan Thaha Saifuddin.

Sultan Thaha Saifuddin naik takhta sebagai Sultan Jambi pada tahun 1855 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984). Berbeda dengan beberapa penguasa sebelumnya, Sultan Thaha menolak pembaruan perjanjian yang dianggap semakin memperbesar campur tangan Belanda terhadap Kesultanan Jambi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984). Penolakan tersebut kemudian memperburuk hubungan politik antara Sultan Thaha dan pemerintah kolonial. Pada tahun 1858, setelah terjadi kegagalan dalam perundingan, Belanda menyerang dan menduduki Keraton Jambi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984; Locher-Scholten, 2018). Sultan Thaha kemudian meninggalkan pusat pemerintahan dan bergerak ke wilayah pedalaman Jambi.

Setelah Sultan Thaha meninggalkan keraton, Belanda mengambil langkah politik dengan mengangkat anggota keluarga Kesultanan Jambi, yaitu Panembahan Prabu, sebagai Sultan dengan gelar Sultan Ahmad Nazaruddin pada 2 November 1858 (Hartono dkk., 1984). Pengangkatan tersebut kemudian menciptakan kondisi politik yang berbeda dari sebelumnya. Di satu sisi, Sultan Ahmad Nazaruddin mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah kolonial Belanda, sedangkan di sisi lain Sultan Thaha tetap dipandang sebagai sultan yang sah oleh sebagian masyarakat Jambi dan masih memiliki pengaruh di wilayah pedalaman (Hartono dkk., 1984)

Keadaan tersebut kemudian dikenal dalam sumber sejarah Jambi sebagai munculnya Sultan Bayangan. Dalam Sejarah Sosial Jambi, Sultan Ahmad Nazaruddin dan sultan-sultan berikutnya yang diangkat Belanda disebut sebagai Sultan Bayang, yaitu sultan yang secara resmi diangkat oleh pemerintah Belanda tetapi tidak memiliki kekuasaan penuh (Hartono dkk., 1984). Sementara itu, Sultan Thaha tetap memiliki kedudukan sebagai sultan yang diakui oleh masyarakat dan menjalankan pengaruhnya dari wilayah uluan Jambi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984.

Pembahasan mengenai Sultan Thaha selama ini lebih banyak diarahkan pada perjuangannya melawan Belanda. Misalnya, penelitian Rosyadi dan Pradjoko membahas strategi Sultan Thaha dalam menghadapi penetrasi Belanda pada 1855–1904, sedangkan Sianipar membahas kepemimpinan Sultan Thaha dalam perlawanan terhadap Belanda (Rosyadi & Pradjoko, 2023; Sianipar, 2022). Penelitian lain juga membahas reaksi Sultan Thaha terhadap penetrasi kolonial (Yulita dkk., 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa kajian tentang Sultan Thaha sudah cukup banyak, khususnya dalam konteks perlawanan.

Berbeda dengan penelitian yang menempatkan perlawanan sebagai fokus utama, tulisan ini memusatkan perhatian pada perubahan struktur kekuasaan setelah pengangkatan Sultan Ahmad Nazaruddin oleh Belanda. Fokus tersebut penting karena persoalannya bukan hanya siapa yang melawan Belanda, tetapi juga bagaimana campur tangan kolonial menghasilkan dua pusat legitimasi kekuasaan dalam Kesultanan Jambi. Dengan demikian, konsep Sultan Bayangan digunakan untuk memahami hubungan antara pengakuan formal yang diberikan Belanda dan legitimasi politik yang masih dimiliki Sultan Thaha di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki dua pertanyaan utama.

Pertama, mengapa muncul kedudukan Sultan Bayangan setelah Sultan Thaha Saifuddin meninggalkan Keraton Jambi pada 1858? Kedua, bagaimana pengangkatan Sultan Ahmad Nazaruddin oleh Belanda membentuk dualisme kekuasaan dalam Kesultanan Jambi? Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses munculnya Sultan Bayangan dan menganalisis terbentuknya dualisme kekuasaan antara Sultan Thaha Saifuddin dan Sultan Ahmad Nazaruddin.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif. Metode sejarah digunakan karena penelitian berfokus pada peristiwa masa lalu dan membutuhkan proses penelusuran, pemeriksaan, serta penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah. Sumber yang digunakan berupa buku sejarah, artikel jurnal, publikasi pemerintah, dan sumber digital yang dapat diakses, antara lain karya Hartono dkk. (1984) dan Locher-Scholten (2004). Melalui metode ini, penelitian memperoleh informasi mengenai kedudukan Sultan Thaha, pengangkatan Sultan Ahmad Nazaruddin, serta perubahan struktur kekuasaan Kesultanan Jambi setelah 1858.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Sultan Thaha Saifuddin sebelum 1858

Sultan Thaha Saifuddin menjadi Sultan Jambi pada 1855 dalam situasi hubungan Kesultanan Jambi dan Belanda yang sudah mengalami ketegangan (Locher-Scholten, 2004) . Sebelum masa Sultan Thaha, Belanda telah membangun hubungan politik melalui berbagai perjanjian dengan penguasa Jambi. Hubungan tersebut pada awalnya berkaitan dengan kepentingan perdagangan, tetapi kemudian berkembang menjadi campur tangan terhadap kedaulatan dan pemerintahan Kesultanan Jambi (Locher-Scholten, 2004) . Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Sultan Thaha setelah naik takhta.

Pada masa pemerintahannya, Sultan Thaha tidak langsung menerima keinginan Belanda untuk memperbarui perjanjian. Sumber yang membahas hubungan Jambi dan Belanda mencatat bahwa setelah Sultan Thaha dinobatkan pada 1855, pemerintah Belanda meminta agar hubungan politik sebelumnya diperbarui (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984) . Sultan Thaha menolak pembaruan tersebut dan tetap mempertahankan perjanjian sebelumnya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984) . Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama antara Sultan Thaha dan Belanda bukan hanya masalah militer, tetapi juga menyangkut posisi dan kedaulatan Kesultanan Jambi.

Penolakan Sultan Thaha akhirnya membawa hubungan dengan Belanda ke arah konflik terbuka. Setelah perundingan tidak mencapai kesepakatan, Belanda menyerang Keraton Jambi pada September 1858 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984) . Sultan Thaha kemudian meninggalkan keraton dan bergerak ke wilayah pedalaman (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984) . Perpindahan tersebut menyebabkan pusat pemerintahan formal Kesultanan Jambi berada dalam penguasaan Belanda, tetapi tidak otomatis menghilangkan pengaruh Sultan Thaha terhadap masyarakat di luar pusat kekuasaan kolonial.

Pengangkatan Sultan Ahmad Nazaruddin sebagai Sultan oleh Belanda

Setelah berhasil menduduki Keraton Jambi, pemerintah kolonial Belanda menghadapi persoalan mengenai siapa yang akan ditempatkan sebagai penguasa Kesultanan Jambi. Belanda kemudian memilih Panembahan Prabu, yang merupakan bagian dari keluarga

Kesultanan Jambi dan sebelumnya memiliki kedudukan sebagai Pangeran Ratu (Hartono dkk., 1984) . Pada 2 November 1858, Panembahan Prabu diangkat menjadi Sultan dengan gelar Sultan Ahmad Nazaruddin (Hartono dkk., 1984) .

Pengangkatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik kolonial. Belanda membutuhkan penguasa yang dapat menerima hubungan politik baru dengan pemerintah kolonial. Pada hari pengangkatannya, Sultan Ahmad Nazaruddin juga menandatangani perjanjian yang menempatkan Jambi di bawah kekuasaan Belanda (Locher-Scholten, 2004) . Isi perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa Jambi menjadi bagian dari jajahan Belanda di Hindia Timur dan Sultan Jambi harus menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah Belanda (Locher-Scholten, 2004)

Dari sudut pandang politik kolonial, pengangkatan Sultan Ahmad Nazaruddin memberikan bentuk pemerintahan yang secara formal tetap menggunakan institusi kesultanan. Namun, kekuasaan tersebut berada dalam hubungan yang sangat kuat dengan pemerintah Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Belanda tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga memanfaatkan struktur politik lokal untuk memperkuat pengaruhnya di Jambi. Pola hubungan antara kesultanan dan pemerintah kolonial tersebut juga menjadi bagian penting dalam kajian Locher-Scholten mengenai perkembangan imperialisme Belanda di Jambi (Locher-Scholten, 2004)

Munculnya Istilah Sultan Bayangan

Pengangkatan Sultan Ahmad Nazaruddin kemudian menghasilkan kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Dalam Sejarah Sosial Jambi, sultan yang diangkat oleh Belanda disebut sebagai Sultan Bayang (Hartono dkk., 1984) Istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa sultan tersebut secara resmi memiliki kedudukan sebagai penguasa, tetapi tidak mempunyai kekuasaan penuh atas seluruh wilayah Kesultanan Jambi (Hartono dkk., 1984) .

Sementara itu, Sultan Thaha tetap berada di wilayah pedalaman Jambi dan masih mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sumber sejarah yang diterbitkan pemerintah mencatat bahwa setelah meninggalkan keraton, Sultan Thaha melanjutkan perlawanan dari pedalaman (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984) . Bahkan setelah Belanda mengangkat Sultan Ahmad Nazaruddin, pengaruh Sultan Thaha tidak langsung hilang karena ia masih dihormati oleh masyarakat dan tetap menjalankan pengaruh politiknya di wilayah uluan Jambi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984) .

Dengan demikian, istilah Sultan Bayangan dapat dipahami melalui perbedaan antara kekuasaan formal dan legitimasi sosial-politik. Sultan Ahmad Nazaruddin memiliki kedudukan formal yang didukung oleh pemerintah Belanda, sedangkan Sultan Thaha tetap memiliki legitimasi di tengah sebagian masyarakat Jambi. Perbedaan tersebut menjadi dasar munculnya dua klaim terhadap kekuasaan Kesultanan Jambi.

Terbentuknya Dualisme Kekuasaan dalam Kesultanan Jambi

Pengangkatan Sultan Ahmad Nazaruddin tidak serta-merta membuat Sultan Thaha kehilangan pengaruh. Setelah meninggalkan pusat pemerintahan, Sultan Thaha tetap berada di wilayah pedalaman dan menjalankan perlawanan dari sana. Sumber tahun 2024 yang membahas sejarah Jambi berdasarkan kajian Locher-Scholten menyebutkan bahwa Sultan Ahmad Nazaruddin berada di wilayah sekitar Jambi, sedangkan Sultan Thaha menetap lebih jauh di wilayah pedalaman dan masih dihormati oleh masyarakat (Locher-Scholten, 2018) .

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dualisme kekuasaan, yaitu keadaan ketika terdapat dua pusat kekuasaan yang mempunyai dasar legitimasi berbeda. Sultan Ahmad Nazaruddin memperoleh legitimasi formal melalui pengangkatan oleh Belanda, sedangkan Sultan Thaha mempertahankan legitimasi sebagai sultan yang sebelumnya telah memerintah

dan masih mendapat pengakuan dari masyarakat. Oleh karena itu, dualisme tersebut bukan sekadar persaingan antara dua tokoh, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan sumber legitimasi kekuasaan.

Dualisme ini juga memperlihatkan bahwa penguasaan wilayah tidak selalu berarti penguasaan penuh terhadap masyarakat. Belanda memang berhasil menguasai pusat pemerintahan dan mengangkat Sultan Ahmad Nazaruddin, tetapi keberadaan Sultan Thaha di pedalaman membuat kekuasaan politik tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada pemerintahan yang didukung Belanda. Dalam konteks ini, pusat pemerintahan formal dan wilayah yang masih berada dalam pengaruh Sultan Thaha dapat dipahami sebagai dua ruang kekuasaan yang berjalan secara bersamaan.

Sultan Bayangan sebagai Bentuk Intervensi Kolonial

Munculnya Sultan Bayangan dapat dilihat sebagai salah satu bentuk intervensi Belanda terhadap struktur politik Kesultanan Jambi. Belanda tidak hanya berusaha menguasai wilayah secara militer, tetapi juga berusaha mengendalikan struktur pemerintahan dengan menempatkan tokoh lokal yang bersedia mengikuti hubungan politik baru dengan pemerintah kolonial (Locher-Scholten, 2004) . Cara tersebut membuat pemerintahan kolonial dapat menggunakan lembaga kesultanan yang sudah dikenal oleh masyarakat.

Penggunaan penguasa lokal juga membuat kolonialisme tidak selalu terlihat dalam bentuk pemerintahan langsung. Dalam kasus Jambi, Belanda tetap mempertahankan jabatan Sultan, tetapi hubungan politik sultan tersebut berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Perjanjian yang ditandatangani Sultan Ahmad Nazaruddin pada 1858 memperlihatkan bagaimana kedudukan sultan dihubungkan dengan kepentingan politik Belanda (Locher-Scholten, 2004) .

Hal tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa kolonialisme dapat bekerja melalui perubahan struktur kekuasaan lokal. Pengangkatan Sultan Ahmad Nazaruddin bukan hanya pergantian tokoh, tetapi juga perubahan dalam sumber legitimasi pemerintahan. Sebelumnya, kedudukan Sultan Thaha berasal dari sistem kesultanan dan hubungan dengan masyarakat, sedangkan setelah 1858 terdapat penguasa yang memperoleh pengakuan melalui dukungan pemerintah kolonial.

Perbedaan Legitimasi Sultan Thaha dan Sultan Ahmad Nazaruddin

Perbedaan antara Sultan Thaha dan Sultan Ahmad Nazaruddin dapat dilihat dari dasar legitimasi masing-masing. Sultan Ahmad Nazaruddin mendapatkan kedudukan melalui pengangkatan oleh Belanda setelah Belanda menguasai Keraton Jambi (Hartono dkk., 1984) . Sebaliknya, Sultan Thaha merupakan sultan yang telah dinobatkan sebelum konflik terbuka dengan Belanda dan tetap mempertahankan kedudukannya setelah berpindah ke wilayah pedalaman (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984) .

Perbedaan tersebut juga tampak dari ruang kekuasaan yang dimiliki. Sultan Ahmad Nazaruddin berada dalam struktur pemerintahan yang berhubungan dengan pemerintah kolonial, sedangkan Sultan Thaha memiliki pengaruh yang lebih kuat di wilayah pedalaman. Sejarah Sosial Jambi bahkan mencatat bahwa wilayah kekuasaan Sultan Ahmad Nazaruddin pada masa tersebut terutama berada di sekitar Kota Jambi, sedangkan wilayah uluan dan Tungkal tetap berada dalam pengaruh Sultan Thaha (Hartono dkk., 1984) .

Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa istilah Sultan Bayangan tidak hanya berkaitan dengan siapa yang mengangkat seorang sultan. Istilah tersebut juga menunjukkan persoalan mengenai seberapa jauh seorang sultan benar-benar mempunyai kekuasaan atas wilayah dan masyarakatnya. Sultan Ahmad Nazaruddin mempunyai kedudukan formal, tetapi ruang kekuasaannya dibatasi oleh kondisi politik dan keberadaan Sultan Thaha di

pedalaman.

Dualisme Kekuasaan sebagai Dampak Politik Kolonial

Dualisme kekuasaan dalam Kesultanan Jambi setelah 1858 memperlihatkan bahwa campur tangan kolonial dapat menghasilkan perubahan pada sistem politik lokal. Sebelum 1858, persoalan utama berada pada hubungan antara Sultan Thaha dan Belanda. Setelah Belanda mengangkat Sultan Ahmad Nazaruddin, konflik tersebut berkembang menjadi persoalan mengenai dua sumber legitimasi dalam satu kesultanan.

Dalam penelitian mengenai Sultan Thaha, perhatian sering diberikan kepada perang gerilya dan strategi perlawanan. Rosyadi dan Pradjoko, misalnya, membahas strategi Sultan Thaha dalam melawan penetrasi Belanda selama 1855–1904 (Rosyadi & Pradjoko, 2023) . Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa Sultan Thaha menggunakan strategi militer dan diplomasi dalam menghadapi tekanan kolonial (Rosyadi & Pradjoko, 2023) . Namun, dari sudut pandang struktur kekuasaan, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan Sultan Thaha di luar pusat pemerintahan membuat Belanda tidak sepenuhnya menghilangkan kekuasaan politiknya.

Dengan demikian, pembahasan mengenai Sultan Bayangan memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami sejarah Sultan Thaha. Sultan Thaha tidak hanya dapat dilihat sebagai pemimpin perlawanan terhadap Belanda, tetapi juga sebagai tokoh yang keberadaannya menyebabkan kekuasaan Kesultanan Jambi tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh penguasa yang didukung kolonial. Sementara itu, Sultan Ahmad Nazaruddin menunjukkan bagaimana Belanda berusaha mempertahankan bentuk kesultanan sambil mengubah hubungan kekuasaan di dalamnya.

KESIMPULAN

Munculnya Sultan Bayangan dalam Kesultanan Jambi berkaitan erat dengan konflik politik antara Sultan Thaha Saifuddin dan pemerintah kolonial Belanda pada 1858. Setelah Belanda menduduki Keraton Jambi dan Sultan Thaha berpindah ke wilayah pedalaman, Belanda mengangkat Panembahan Prabu sebagai Sultan Ahmad Nazaruddin pada 2 November 1858. Pengangkatan tersebut menciptakan perbedaan antara kekuasaan formal yang diberikan Belanda kepada Sultan Ahmad Nazaruddin dan legitimasi yang masih dimiliki Sultan Thaha di tengah masyarakat. Kondisi tersebut kemudian membentuk dualisme kekuasaan dalam Kesultanan Jambi, karena terdapat dua pusat legitimasi yang berjalan pada waktu yang sama. Sultan Ahmad Nazaruddin memiliki kedudukan formal yang didukung Belanda, sedangkan Sultan Thaha tetap memiliki pengaruh di wilayah pedalaman dan masih dipandang sebagai sultan yang sah oleh masyarakat. Dengan demikian, istilah Sultan Bayangan dapat dipahami sebagai gambaran mengenai penguasa yang memiliki kedudukan formal tetapi ruang kekuasaannya terbatas, sedangkan dualisme kekuasaan menunjukkan adanya perbedaan antara legitimasi kolonial dan legitimasi politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1983/1984). Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Jambi. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Dokumentasi Sejarah Nasional.

Hartono, Margono, Mujilan, & J. R. Chaniago. (1984). Sejarah Sosial Jambi: Jambi sebagai Kota Dagang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Locher-Scholten, Elsbeth. (2004). Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830–1907. Singapore: Singapore University Press/Cornell Southeast

Asia Program Publications.
Locher-Scholten, Elsbeth. (2018). "The Struggle for Power in 1858." Dalam Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830–1907. Ithaca: Cornell University Press.
Rosyadi, Ratih Ummi, & Didik Pradjoko. (2023). "Strategi Sultan Thaha Syaifuddin dalam Melawan Penetrasi Belanda di Kesultanan Jambi (1855–1904)." Jurnal Ilmiah Dikdaya, 13(2), 595–608.
Sianipar, Indra Martin. (2022). "Analisis Kepemimpinan Sultan Thaha Saifuddin dalam Perlawanan terhadap Belanda di Jambi." Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi, 1(1), 94–100.
Yulita, Ona, Doni Nofra, & Muhammad Ahat. (2019). "Perjuangan Sultan Thaha Saifuddin dalam Menentang Kolonial Belanda di Jambi: Tinjauan Historis 1855–1904 M." Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban"